

**PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KAUM DIFABEL di BIDANG  
PENDIDIKAN dan KETENAGAKERJAAN di KOTA YOGYAKARTA**

**Jurnal Skripsi**



Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Disusun Oleh :

Rendy Oktovianus

20120520065

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

Difabel adalah istilah untuk orang yang berkebutuhan khusus. Masyarakat sering memandang rendah terhadap difabel. Sikap negatif masyarakat membawa dampak kesulitan fisik dan psikologis bagi kaum difabel. Secara psikologis, kaum difabel harus menanggung beban rasa rendah diri. Secara fisik, mereka menerima perlakuan yang kurang wajar, misalnya hambatan dalam belajar, penyesuaian dalam kehidupan masyarakat, mencari pekerjaan, aksesibilitas, dan sebagainya.. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pelayanan publik terhadap kaum difabel di bidang pendidikan dan ketenaga kerjaan kota Yogyakarta?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan publik terhadap kaum difabel di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitiannya adalah di kota Yogyakarta. Disini lokasi penelitiannya ada di 4 tempat yaitu SLB N 1 Yogyakarta, SMK 3 Muhammadiyah Yogyakarta dan Perusahaan SAUJANA.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pelayanan publik terhadap difabel di bidang pendidikan dan tenaga kerja di Yogyakarta sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang sudah menunjukkan arah yang baik. Meskipun ada beberapa hal yang harus di perbaiki seperti di bidang pendidikan adalah kualitas dan kuantitas guru di sekolah dan di bidang tenaga kerja adalah fasilitas yang diberikan perusahaan terhadap karyawan nya.

Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang harus di perbaiki baik di bidang pendidikan maupun di bidang tenaga kerja. Di bidang pendidikan misalnya, sekolah harus membuka selebar lebarnya pintu untuk anak difabel. untuk saat ini tetapi sekolah inklusif hanya bisa menerima siswa difabel dengan cacat fisik ringan. Sedangkan untuk tenaga kerja perusahaan harus memperhatikan fasilitas dan kesejahteraan karyawannya yang difabel.

**Kata kunci: Difabel, Pelayanan Publik**

### 1. Pendahuluan

#### a. Latar Belakang

Difabel adalah istilah untuk orang yang berkebutuhan khusus. Difabel disini meliputi ibu hamil, anak-anak, lanjut usia, pengguna kursi roda, kruk, tunanetra, tunarungu, tunadaksa dan sebagainya. Jumlah difabel di Indonesia pada tahun 2007 diprediksi sekitar 7,8 juta jiwa . Sementara itu, jumlah difabel di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meningkat setelah bencana alam gempa bumi melanda tahun 2006. Saat ini tercatat jumlah difabel di Propinsi DIY pada tahun 2011 adalah 35. 264. <sup>1</sup>

Banyak orang memandang rendah kaum difabel karena menurut mereka kaum ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam penelitian Wahono sikap negatif masyarakat membawa dampak kesulitan fisik dan psikologis bagi kaum difabel. Secara psikologis, kaum difabel

---

<sup>1</sup> Rahayu, S., & Ahdiyana, U. D. M. (2015). PELAYANAN PUBLIK BIDANG TRANSPORTASI BAGI DIFABEL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *JURNAL SOCIA*, 12(2).

harus menanggung beban rasa rendah diri. Secara fisik, mereka menerima perlakuan yang kurang wajar, misalnya hambatan dalam belajar, penyesuaian dalam kehidupan masyarakat, mencari pekerjaan, aksesibilitas, dan sebagainya. Masalah yang dihadapi para difabel yang sering mencuat adalah belum tersedianya fasilitas publik yang memungkinkan mereka hidup mandiri, misalnya belum semua sekolah terbuka bagi difabel, belum semua sekolah mempunyai sarana bagi pemakai kursi roda, belum semua sarana umum seperti stasiun kereta api, gedung bioskop, pertokoan, pasar, terminal dan sebagainya belum mempunyai toilet atau fasilitas lain yang aksesibel bagi kaum difabel (2007).<sup>2</sup>

Di dunia pendidikan misalnya, kaum difabel sering dikucilkan, terlihat dari pemisahan sekolah-sekolah yang ada. Misal adanya sekolah luar biasa bagi penyandang disabilitas. Bagaimana penyandang disabilitas dapat merasakan pendidikan yang sama dari orang-orang pada umumnya, sedangkan dirinya saja selalu tersudutkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan kaum disabilitas adalah adanya penyesuaian kurikulum pendidikan bagi dirinya, dan bukan pembedaan sekolah.<sup>3</sup>

Sedangkan dalam bidang ketenaga kerjaan kebijakan-kebijakan dalam memenuhi hak penyandang disabilitas belum berjalan maksimal. Terkait dengan rekrutmen misalnya, banyak persyaratan kerja yang secara langsung mendiskriminasi dan mengeliminasi sejak proses seleksi administrasi. Di lembaga pemerintah maupun lembaga swasta persyaratan masuk kerja selalu menyertakan kesehatan jasmani dan rokhani, dan ini dimaknai tidak mengalami kecacatan. Penegakan kebijakan afirmatif 1% juga belum dilakukan secara maksimal. Menurut PP no 43 diatas perusahaan yang tidak mempekerjakan atau menolak mempekerjakan penyandang disabilitas bisa diancam dengan pidana kurungan 6 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000. . Namun dari tahun 1997 sampai sekarang belum ada informasi bahwa ada seorang pengusaha atau pejabat perekrut tenaga kerja di instansi pemerintah didenda atau dipidana karena pelanggaran pasal ini. Menarik untuk dicatat disini bahwa pendekatan yang banyak dilakukan LSM difabel atau pihak Dinas Tenaga Kerja untuk mempromosikan tenaga kerja difabel bukanlah kebijakan afirmatif 1% , melainkan menekankan kerjasama dan partnership dengan memakai logika pasar, yang menurut mereka lebih efektif.<sup>4</sup>

## **b. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pelayanan publik terhadap kaum difabel di bidang pendidikan dan ketenaga kerjaan kota Yogyakarta?

---

<sup>2</sup> Mujimin WM. (2007 Mei). Penyediaan Fasilitas Publik yang Manusiawi Bagi Aksesibilitas Difabel, *Dinamika Pendidikan* No. 1/ Th.XIV / Mei 2007, pp 60-74

<sup>3</sup> Pratomo, D. T. (2015). PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS (PEOPLE WITH DISABILITY) DI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.

<sup>4</sup> RO'FAH, A. N. D. A. Y. A. N. I., & SUPARTINI, D. (2012). KEBIJAKAN BERBASIS HAK: PENGALAMAN PEMERINTAH DIY DALAM PENYUSUNAN PERDA PENYANDANG DISABILITAS. *WELFARE JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL VOLUME 1, NOMOR 2, DESEMBER 2012*.

## **2. Kerangka Teori**

### **a. Difabel**

Istilah Difabel berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*. Yang berarti manusia yang memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negative dan terkesan diskriminatif. Istilah difabel didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan ataupun ke'abnormal'an.<sup>5</sup>

Jadi disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:<sup>6</sup>

1. penyandang cacat fisik;
2. penyandang cacat mental; serta
3. penyandang cacat fisik dan mental

### **b. Pelayanan publik difabel**

Pelayanan publik difabel adalah pelayanan yang diberikan pemerintah terhadap difabel untuk memudahkan mereka untuk menjalani kebutuhannya. Pelayanan publik tersebut antara lain: pertama, pelayanan pendidikan (pendidikan inklusi, sekolah luar biasa, dan blind corner di Arpusda). Kedua, pelayanan sosial dan ketenagakerjaan yang terdiri dari rehabilitasi dan pelayanan sosial (Kursus sulam, Program Pemberdayaan Keluarga Difabel, Program bantuan pemberian alat bantu bagi kaum difabel, Program santunan jaminan hidup dari Kementerian Sosial, dan Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Difabel), dan pengembangan dan penyaluran kerja. Ketiga, Aksesibilitas perhubungan: bis Transjogja, terminal Giwangan, Stasiun Tugu, sepeda motor bagi difabel dan marka rambu. Keempat, Aksesibilitas bangunan dan fasilitas umum: pembuatan trotoar khusus difabel dan fasilitas umum ramah difabel seperti jalan landai dan toilet khusus di pusat perbelanjaan dan perkantoran. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan, pelayanan yang ada seperti JAMKESMAS, JAMKESSOS dan JAMKESDA<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Rahayu, S., Dewi, U., Utami, A. S., & Rahajeng, U. PELAYANAN PUBLIK BAGI KAUM DIFABEL DI KOTA YOGYAKARTA.

<sup>6</sup> Sugi Rahayu dan Utami Dewi. (2013). Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Kota Yogyakarta, Natapraja no 1 vol, pp 1-18

<sup>7</sup> Sugi Rahayu dan Utami Dewi. (2013). Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Kota Yogyakarta, Natapraja no 1 vol, pp 1-18

### c. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah kemudahan difabel dalam menjalankan kehidupannya. Setidaknya terdapat empat azas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas difabel tersebut yang mutlak mestinya harus dipenuhi oleh pemerintah yakni: <sup>8</sup>

1) Azas kemudahan

artinya setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.

2) Azas kegunaan

artinya semua orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.

3) Azas keselamatan

artinya setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk difabel.

4) Azas kemandirian

artinya setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No 4 Tahun 1997

### **3. Pembahasan**

#### **A. Pelayanan publik di bidang pendidikan**

##### **1. Penerimaan siswa**

###### **a) Di SLBN 1 Yogyakarta**

SLBN 1 Yogyakarta rutin membuka penerimaan siswa baru setiap tahunnya. Penerimaan siswa baru di SLBN 1 Yogyakarta ini biasa dilakukan di awal kalender akademik mereka. SLBN 1 Yogyakarta ini selalu menerima setiap siswa yang ingin mau sekolah di SLBN 1 Yogyakarta. Penerimaan siswa difabel di SLBN 1 Yogyakarta rata-rata mencapai 10 sampai 11 siswa setiap tahunnya.

Tidak ada pembatasan dan kuota khusus dari sekolah untuk penerimaan siswa baru. Mekanisme penerimaan siswa di SLBN 1 Yogyakarta hampir sama dengan mekanisme penerimaan siswa di sekolah biasa. Biasanya SLBN 1 Yogyakarta membuat suatu kepanitiaan khusus untuk penerimaan mahasiswa baru. Nantinya setiap peserta didik difabel harus membawa syarat atau ketentuan sebelum waktu yang tersedia habis. Syarat yang ditentukan SLBN 1 Yogyakarta ini juga sangat mudah untuk dipenuhi.

Setelah persyaratan semua telah di lengkapi. Calon siswa baru di SLBN 1 Yogyakarta harus lulus beberapa tahapan. Tahapan ini telah dirancang sesuai dengan kebutuhan antara calon peserta didik dengan pihak sekolah. Ada 2 tahapan yang harus dilaksanakan oleh calon peserta didik difabel di SLBN 1 Yogyakarta. Tahapan pertama adalah tes psikologi, tes psikologi adalah tes untuk menentukan mereka anak difabel atau tidak. Selanjutnya adalah tahap kedua yaitu siswa mau di assignment dari sekolah. Maksud assignment disini adalah calon siswa mau untuk ditetapkan menjadi peserta didik di SLBN 1 Yogyakarta.

###### **b) Di SMK 3 Muhammadiyah**

Sedangkan untuk penerimaan siswa baru di SMK 3 Muhammadiyah juga sama seperti penerimaan siswa biasa di SMA/SMK lainnya. Penerimaan siswa difabel di SMK 3 Muhammadiyah ini juga rutin dilakukan setiap tahun. Rata-rata penerimaan siswa difabel di SMK 3 Muhammadiyah ini mencapai angka 3 siswa setiap tahunnya.

Penerimaan siswa baru SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta mengikuti kebijakan dinas pendidikan kota Yogyakarta yang menerapkan Sistem Penerimaan Baru (PSB) dengan Sistem Real Time Online (RTO) dan Sistem Reguler yang sudah berjalan selama ini. Peserta didik yang mau mendaftarkan diri harus membawa persyaratan yang diperlukan. Tidak ada pembatasan dan kuota khusus untuk siswa difabel yang ingin masuk kedalam SMK 3 Muhammadiyah ini. Tetapi untuk saat ini SMK 3 Muhammadiyah hanya menerima siswa tuna rungu dan siswa difabel yang memiliki cacat fisik ringan. Siswa difabel yang lulusan SMPLB juga bisa mendaftar di SMK 3 Muhammadiyah ini.

Untuk pendidikan inklusif di SMK 3 Muhammadiyah Yogyakarta tidak ada syarat atau ketentuan khusus untuk anak difabel. Setelah memberikan syarat yang diperlukan, calon siswa difabel akan di tes 2 kali. Tes pertama adalah tes wawancara yang akan dilakukan di sekolah. Tes wawancara biasanya dilakukan oleh guru di SMK 3 Muhammadiyah. Peserta wajib menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh guru dalam test wawancara. Untuk tes kedua

adalah tes akademik, tes ini juga dilakukan sekolah. Setelah selesai mengikuti 2 tes ini maka calon siswa akan menunggu hasil dari tes ini.

## **2. Akomodasi fisik yang disediakan sekolah**

### **I. Fasilitas**

#### **a. Di SLBN 1 Yogyakarta**

SLBN 1 Yogyakarta adalah SLBN yang khusus anak Tuna Grahita. Anak tuna grahita secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental, intelektual jauh dibawah rata-rata sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik. Komunikasi maupun sosial, sehingga memerlukan layanan pendidikan kebutuhan khusus. Alat Bantu pelajaran penting diperhatikan dalam mengajar anak tunagrahita. Tidak ada fasilitas fisik khusus yang disediakan oleh sekolah untuk siswa difabel. Mereka menganggap bahwa siswanya cacat secara mental bukan fisik. Jadi mereka hanya menyiapkan fasilitas khusus hanya dalam media pembelajaran. Hal ini disebabkan anak tunagrahita kurang mampu berfikir abstrak, mereka membutuhkan hal-hal kongkrit. Agar terjadinya tanggapan tentang obyek yang dipelajari, maka dibutuhkan alat pelajaran yang memadai.

APE ini sangat membantu sekali dalam proses pembelajaran. Karena anak difabel di SLBN 1 Yogyakarta ini tuna grahita jadi sangat sulit bagi mereka untuk bisa menerima pelajaran secara langsung. Mereka membutuhkan media supaya mereka bisa mudah paham dalam proses belajar mengajar. Dengan menggunakan APE ini, para siswa difabel bisa belajar sambil bermain.

#### **b. Di SMK 3 Muhamadiyah Yogyakarta**

Berbeda dengan SLBN 1 Yogyakarta, di SMK 3 Muhamadiyah tidak ada fasilitas khusus yang diberikan sekolah untuk anak difabel. Mereka di perlakukan sama dengan siswa normal. Hal ini di karenakan 12 siswa difabel di SMK 3 Muhamadiyah ini adalah tuna rungu sehingga tidak dibutuhkan sarana prasarana khusus untuk mereka.

Anak inklusif di SMK 3 Muhamadiyah Yogyakarta biasa semuanya menggunakan alat bantu dengar untuk memudahkan mereka dalam aktifitas sehari-hari di kelas. Pihak sekolah menggap mereka tidak membutuhkan alat bantu khusus seperti symbol petunjuk dan lain lain.

### **II. Guru**

#### **a. Di SLBN 1 Yogyakarta**

Jumlah guru di SLBN 1 Yogyakarta ini ada 41 orang. 41 guru di SLBN 1 Yogyakarta 36 orang guru di SLBN 1 Yogyakarta disini adalah PNS. Sedangkan untuk GTT (Guru Tidak Tetap) di SLBN ada 5 orang. GTT (Guru Tidak Tetap) di SLBN 1 Yogyakarta biasanya adalah mahasiswa Universitas di Yogyakarta yang magang. Hal itulah yang menyebabkan perbandingan antara guru PNS dan GTT sangat jauh. Padahal SLBN 1 Yogyakarta selalu menerima mahasiswa/mahasiswi yang ingin magang di SLB ini.

Dari total 41 guru di SLBN 1 Yogyakarta, 35 guru disini sudah mendapatkan gelar PLB. Hanya ada 6 guru disini yang masih bergelar S.Pd. Perbandingan jumlah guru PLB dan S.Pd di SLBN 1 Yogyakarta ini cukup tinggi. Dari 41 guru di SLBN 1 Yogyakarta, 83.36% guru di SLBN 1 Yogyakarta sudah mengerti tentang PLB. Biasanya pemerintah disini melakukan diklat untuk memberi pelatihan kepada guru-guru yang belum pengalaman disini untuk mengerti tentang PLB. diklat disini juga biasanya mengangkat guru yang masih betitle S.Pd menjadi PLB.

Jumlah anak di SLBN 1 Yogyakarta yang aktif untuk saat ini berjumlah 90 anak. Jika di lihat dari ratio perbandingan jumlah guru dan jumlah murid di SLBN 1 Yogyakarta masih kurang. Jumlah ratio perbandingan anantara guru dan siswa di SLBN1 Yogyakarta ini mencapai angka 2.19, itu berarti setiap guru maksimal membimbing 3 murid di SLBN 1 Yogyakarta. Padahal kalau dilihat dari karakteristik siswa di SLB ini yang semuanya adalah autisme seharusnya 1 guru harus membimbing maksimal 2 siswa.

#### **b. Di SMK 3 Muhammadiyah Yogyakarta**

Berbeda dengan guru di SLBN 1 Yogyakarta di SMK 3 Muhammadiyah tidak ada guru khusus untuk mengajar difabel. Cuma ada sosialisasi khusus dari sekolah kepada guru bagaimana cara mengajar difabel itu. Guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah, sehingga kurikulum untuk difabel sama dengan yang lainnya. Hal ini disampaikan oleh pak Suhaimin selaku kepala di bidang pendidikan inklusif yang berkata:

“Guru disini tidak ada yang belatar belakang PLB, mereka juga tidak pernah mendapatkan diklat tentang ABK (anak berkebutuhan khusus) jadi disini adalah fungsi kami untuk mesosialisasikan bagaimana cara mengajar yang baik terhadap difabel. Biasanya setelah di berikan sosialisasi tentang ABK mereka mulai mengerti bagaimana menangani mereka”

Metode mengajar yang dipergunakan oleh guru bervariasi. Antara lain dilakukan dengan ceramah, diskusi, tanya jawab maupun presentasi yang melibatkan pihak guru dan siswa maupun salah satu pihak saja. Perlakuan siswa tuna rungu pada saat kegiatan belajar mengajar tentunya menuntut kesabaran dan ketrampilan tenaga pendidik yang mengajar di kelas. Murid murid difabel yang berada di SMK 3 Muhammadiyah Yogyakarta juga bisa mengikuti pelajaran dengan baik walaupun dengan kekurangannya.

### **3. Akomodasi non fisik yang disediakan sekolah**

#### **I. Kurikulum**

##### **a. Di SLBN 1 Yogyakarta**

Untuk kurikulum, SLBN 1 Yogyakarta disini menggunakan kurikulum KTSP, KTSP di sini ada 2 . untuk SD kelas 1, 3, 4, 5 menggunakan kurikulum K13. Untuk SMP dan SMALB SLBN 1 Yogyakarta ini menggunakan kurikulum 2006. Kurikulum yang di gunakan di SLBN 1 Yogyakarta disini menyesuaikan dengan keadaan siswa difabel yang semuanya adalah anak Tuna Grahita (Autis)



Kurikulum KTSP memang kurikulum yang di anjurkan oleh pemerintah. Dengan kurikulum yang dimodifikasi ini diharapkan para siswa di SLBN 1 Yogyakarta ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Walaupun semua siswa difabel di SLBN 1 Yogyakarta ini adalah anak tuna grahita di harapkan mereka mampu untuk menyerap ilmu yang diberikan oleh guru dengan baik.

Dengan dibuat modifikasi kurikulum KTSP ini, siswa diajarkan untuk belajar sambil bermain. Hal ini dikarena siswa disana adalah anak tuna grahita jadi diperlukan obyek pembelajaran yang menarik perhatian mereka. Dengan sistem belajar sambil bermain ini di harapkan mereka mampu menegerti tentang apa yang di diajarkan oleh guru disana.

## **b. Di SMK 3 Muhamadiyah Yogyakarta**

Sedangkan kurikulum yang digunakan di SMK 3 Muhamadiyah adalah kurikulum 2010 mengacu pada Permendiknas nomor 58 dan dimodifikasi berdasarkan tahap perkembangan serta minat peserta didik. Program pembelajaran dikembangkan melalui bentuk aktivitas yang bervariasi dan dimodifikasi sesuai karakteristik peserta didik. Seluruh peserta didik bermain dan belajar bersama. Hal ini sesuai dengan kurikulum pendidikan inklusif yang dikemukakan oleh Tarmasyah (2007: 168). Kurikulum yang digunakan di kelas inklusi adalah kurikulum anak normal (reguler) yang disesuaikan (dimodifikasi) sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa.

Modifikasi alokasi waktu disesuaikan dengan mengacu pada kecepatan belajar siswa. Misalnya materi pelajaran (pokok bahasan) tertentu dalam kurikulum reguler (Kurikulum Sekolah Dasar) diperkirakan alokasi waktunya selama 6 jam. Dikarenakan anak berkebutuhan khusus di SMK 3 Muhamadiyah memiliki inteligensi relatif normal materi dalam kurikulum sekolah pun dapat tetap dipertahankan, dan tingkat kesulitannya agak diturunkan sedikit. Sekolah juga menerapkan pendekatan pembelajaran kompetitif seimbang dengan pendekatan pembelajaran kooperatif. Melalui pendekatan pembelajaran kompetitif anak dirangsang untuk berprestasi setinggi mungkin dengan cara berkompetisi secara fair. anak dan jiwa kerjasama serta saling tolong menolong akan berkembang dengan baik. Dengan demikian, jiwa kompetisi dan jiwa kerjasama anak akan berkembang harmonis.

## **II. Keadaan Lingkungan**

### **a. Di SLBN 1 Yogyakarta**

Lingkungan merupakan hal yang sensitive untuk anak difabel. karena keadaan lingkungan itulah yang membuat siswa difabel untuk betah sekolah. Untuk lingkungan di dalam kelas SLBN 1 Yogyakarta disini dibuat senyaman mungkin untuk siswa difabel. Biasanya mereka nyaman berada di kelas karena kondisi ruang kelas yang bersahabat dengan mereka. Teman-teman dan guru juga menerima kekurangan mereka dengan baik. Di dalam kelas biasanya mereka saling bercanda dengan satu dan yang lainnya. Mereka kadang juga belajar dikelas walaupun bukan jam belajar.

Sedangkan untuk lingkungan di luar kelas para siswa difabel juga merasa nyaman karena banyak tempat bermain untuk mereka. Mereka bisa bermain di lapangan basket yang disediakan sekolah. Mereka juga bersahabat dengan para pekerja di SLBN 1 Yogyakarta ini seperti dengan satpam, bagian TU dan lainnya. Warga disekitar juga tidak pernah mempersalahkan keberadaan mereka. Malahan lingkungan warga disekitar SLBN 1 Yogyakarta bersahabat dengan mereka. Hal ini dikarenakan SLBN 1 Yogyakarta ini di bangun pada tahun 1968. Sehingga masyarakat sudah mulai terbiasa dengan keberadaan mereka.

## **2. Di SMK 3 Muhammadiyah Yogyakarta**

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang bersekolah di SMK 3 Muhammadiyah mendapatkan pelayanan yang sama seperti peserta didik yang lain. Tidak ada kelas khusus yang membedakan antara ABK dengan peserta didik lainnya. Mereka bermain dan belajar bersama. Serta saling menghargai satu sama lain sehingga peka terhadap lingkungannya. Lingkungan di dalam kelas dibuat nyaman mungkin untuk anak difabel. Siswa dan guru dibuat bersahabat untuk mereka. Walaupun kadang-kadang guru dan murid lainnya agak kesulitan berkomunikasi dengan mereka. Walaupun kadang kala ada saja anak-anak yang mengejek mereka karena kekurangan mereka.

Lingkungan memang masalah yang besar bagi siswa difabel. Kadang mereka dibuat minder oleh kekurangan mereka. Kadang juga ada saja siswa yang berbuat jahil seperti membully dan mengejek mereka. Tetapi disinilah peran sekolah untuk bisa membuat betah para difabel. Walaupun mereka kurang tapi mereka di tuntut untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kadang mereka juga malu karena sering diejek oleh teman sekolahnya.

## **B. Pelayanan publik terhadap difabel di bidang tenaga kerja**

### **I. Proses penerimaan pegawai**

#### **a. Mekanisme penerimaan pegawai**

SAUJANA rutin membuka lowongan kerja untuk difabel setiap tahunnya. Alasan SAUJANA membuka lowongan pekerja untuk para difabel karena mereka ingin membantu para difabel dan manager dari SAUJANA ini juga adalah seorang difabel. Untuk saat ini jumlah karyawan di SAUJANA ada 10 orang terdiri dari 6 orang karyawan biasa dan 4 orang karyawan difabel.

Dalam mekanisme penerimaan karyawan difabel di perusahaan ini, SAUJANA membuka lowongan selebar-lebarnya. Perusahaan SAUJANA juga memastikan bahwa proses perekrutan yang mereka lakukan sudah menarik pelamar dari sebanyak mungkin penyandang cacat yang memiliki kemampuan. Mereka melakukan hal seperti misalnya, mempublikasikan lowongan pekerja di media cetak, radio. Saujana juga mempromosikan lowongan pekerja di media sosial melewati facebook, twitter dan situs perusahaan mereka.

Prinsip rekrutmen pegawai yang dilakukan oleh SAUJANA sudah sesuai dengan prinsip yang di gunakan oleh ILO (International labour organization). Prinsip itu adalah prinsip non diskriminasi terhadap difabel. Prinsip non-diskriminasi ini perlu dihargai selama proses perekrutan, untuk menjamin manfaat maksimum bagi pengusaha dan peluang yang setara bagi

semua calon pegawai baik para penyandang cacat atau tidak. Para pengusaha dapat, misalnya, menyelipkan pernyataan tentang komitmen atas kesetaraan peluang dalam prosedur perekrutan dan dalam iklan lowongan kerja, menggunakan logo untuk menunjukkan bahwa kebijakan demikian berlaku di perusahaan, secara khusus meminta lamaran dari para penyandang cacat, dan menyatakan bahwa semua calon akan dipertimbangkan semata-mata berdasarkan kemampuan mereka.

## **b. Syarat penerimaan pegawai**

Tidak ada syarat khusus untuk difabel melamar kerja di perusahaan SAUJANA ini. Para pelamar difabel hanya harus membuat surat lamaran kerja mereka sebelum waktu yang ditentukan habis. Pelamar juga harus membawa photocopy KTP dan membawa photo 3×4. Karyawan wajib membawa semua syarat yang diperlukan itu sebelum waktu yang ditentukan habis. Kuota penerimaan karyawan difabel di perusahaan ini juga tidak terlalu banyak. Biasanya perusahaan Cuma membutuhkan 3 sampai 5 karyawan yang difabel.

Setelah semua surat lamaran terkumpul, karyawan yang bertugas di bidang tenaga kerja mulai untuk memverifikasi surat lamaran yang masuk. Setelah itu baru mereka mulai untuk memilih mana karyawan difabel yang dipilih. Tetapi sayangnya minat difabel kurang untuk mau memberikan surat lamaran kerja. Syarat yang diajukan dari Saujana memang tidak berat yang penting mereka bisa mengoperasikan computer dan mempunyai etos kerja yang baik. Hal ini karena perusahaan tidak mau membebani calon karyawan difabel dengan syarat yang berat

## **2. Akomodasi Fisik**

### **I. Kondisi tempat kerja**

Kondisi tempat kerja di buat nyaman mungkin terhadap kaum difabel. Dikarenakan karyawan difabel di perusahaan SAUJANA adalah bekursi roda jadi tempat kerja mereka dibuat tidak ada penghalang atau penghambat untuk bisa membuat mereka leluasa dalam bergerak bergerak. Di ruang kerja mereka juga disediakan kursi yang nyaman untuk mereka untuk bekerja. Kondisi tempat kerja mereka juga rapi dan bersih. Hal ini sengaja dilakukan supaya mereka nyaman untuk bekerja.

### **II. Fasilitas yang disediakan tempat kerja**

Fasilitas yang di berikan SAUJANA terhadap karyawannya boleh dibilang sangat baik. hal ini dapat di lihat dari RAM dan WC yang di modifikasi untuk karyawan difabel. Fasilitas ini diberikan untuk membuat mereka nyaman dalam bekerja sehingga nantinya membuat mereka betah untuk bekerja.

#### **1. RAM**

RAM di SAUJANA ini terletak di bagian depan perusahaan. Hal supaya para karyawan difabel mudah untuk keluar masuk ke dalam perusahaan SAUJANA. Berikut adalah photo dari RAM di perusahaan SAUJANA:



Sumber Data : SAUJANA

Berdasarkan standar fasilitas difabel ideal ramp mestinya mempunyai ukuran 1:12 hingga 1:15 antara tinggi dan alasnya. Ini berarti ramp yang berada di SAUJANA ini sudah sesuai dengan standar fasilitas difabel. Hanya saja untuk saat ini ramp di SAUJANA hanya ada satu saja. Seharusnya SAUJANA menyiapkan 2 ramp untuk pintu belakang kantor

## 2. WC

WC di perusahaan SAUJANA ini sudah di modifikasi sesuai dengan karyawannya yang memakai kursi roda. WC di perusahaan SAUJANA ini mempunyai pegangan untuk dapat memudahkan para karyawan difabel yang ingin pergi ke WC. Berikut adalah foto dari WC tersebut



Sumber Data : SAUJANA

Ketinggian standar dudukan kursi roda adalah 480 mm dari permukaan lantai, sedangkan ketinggian standar dudukan toilet adalah 430mm. Dengan perbandingan ketinggian seperti itu, tidak terlalu sulit untuk berpindah dari kursi roda ke dudukan toilet. Lalu, bagaimana jika ingin

kembali ke kursi roda? Untuk berpindah, pengguna harus mengandalkan kekutan tangannya untuk mengangkat seluruh badannya. Dengan adanya pegangan tangan di toilet diharapkan para karyawan difabel bisa untuk kembali ke kursi rodanya.

### **3. Akomodasi Non-Fisik.**

#### **I. Jam kerja**

Jam kerja di perusahaan ini sama dengan jam kerja di perusahaan lainnya. Dimana mereka harus bekerja dari jam 08.00-15.00. mereka bekerja dari hari senin sampai dengan hari sabtu. Tidak ada perbedaan jam kerja antara karyawan difabel dan karyawan biasa. Jam kerja di SAUJANA sudah sesuai dengan undang undang. Menurut Undang undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Untuk karyawan yang bekerja 6 hari dalam seminggu, jam kerjanya adalah 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu. Sedangkan untuk karyawan dengan 5 hari kerja dalam 1 minggu, kewajiban bekerja mereka 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu. Jadi kalau dilihat UU di atas karyawan difabel di perusahaan SAUJANA sudah melaksanakan jam kerja efektif mereka.

#### **II. Keadaan lingkungan**

lingkungan di perusahaan SAUJANA sangat baik. Para karyawan biasa sudah terbiasa dengan karyawan difabel. Malahan mereka sudah berteman dekat. Tidak pernah ada masalah antara karyawan biasa dengan karyawan difabel. Mereka sudah terbiasa dengan keadaan karyawan difabel.

Untuk menghangatkan suasana biasanya mereka sering makan siang bersama. Tidak ada saling kecemburuan antara karyawan biasa dan karyawan difabel. Karyawan difabel juga sangat betah kerja disini karena keadaan lingkungan yang mendukung. Mereka merasa nyaman bekerja dan hasil yang mereka ciptakan juga maksimal.

Masyarakat setempat juga tidak pernah terganggu dengan keberadaan karyawan difabel. Kadang malahan terlihat ada karyawan yang memakai kursi roda di tolong oleh warga sini untuk masuk ke perusahaan. Hal ini menandakan bahwa difabel sudah mulai diterima di masyarakat luas. Mereka tidak menganggap difabel sebagai orang aneh lagi.

#### **III. Gaji**

Tidak ada jumlah pasti nominal gaji yang diberikan perusahaan SAUJANA terhadap karyawan difabel. Yang pasti jumlah gaji tersebut diatas UMR kota Yogyakarta yang berjumlah Rp 1.452.400. Jumlah gaji ini dinilai pantas dengan kinerja karyawan di saujana. Jumlah gaji ini juga tidak ada perbedaan dengan karyawan biasa yang ada di saujana. Jadi jumlah gaji ini semua disamakan. Hal ini dikarenakan perusahaan SAUJANA takut nanti adanya kecemburuan antara karyawan biasa dan karyawan difabel.

Walaupun dengan adanya keterbatasan yang dimiliki oleh karyawan difabel tersebut, sang majikan bukannya memanfaatkannya misalnya dengan mengeksploitasi tenaganya. Sebaliknya apa yang diberikan sang majikan terhadap karyawan difabel dan non difabel sama, artinya upah yang diberikan kepada keduanya sama. Bahkan untuk ukuran sebuah home industry, upah yang diberikan termasuk sudah besar, sementara beban kerja yang diberikan tidak terlalu berat.

#### **4. Penutup**

##### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pelayanan publik terhadap difabel di bidang pendidikan dan tenaga kerja di Yogyakarta sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang sudah menunjukkan arah yang baik. Meskipun ada beberapa hal yang harus di perbaiki seperti di bidang pendidikan adalah kualitas dan kuantitas guru di sekolah dan di bidang tenaga kerja adalah fasilitas yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

##### **b. Saran**

Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang harus di perbaiki baik di bidang pendidikan maupun di bidang tenaga kerja. Di bidang pendidikan misalnya, sekolah harus membuka selebar lebarnya pintu untuk anak difabel. Untuk saat ini sekolah inklusif hanya bisa menerima siswa difabel dengan cacat fisik ringan. Sedangkan untuk tenaga kerja perusahaan harus memperhatikan fasilitas dan kesejahteraan karyawannya yang difabel.

## Daftar Pustaka

- Rahayu, S., & Ahdiyana, U. D. M. (2015). PELAYANAN PUBLIK BIDANG TRANSPORTASI BAGI DIFABEL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *JURNAL SOCIA*, 12(2).
- Mujimin WM. (2007 Mei). Penyediaan Fasilitas Publik yang Manusiawi Bagi Aksesibilitas Difabel, *Dinamika Pendidikan* No. 1/ Th.XIV / Mei 2007, pp 60-74
- Habibi, R. S. (2014). HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM BIDANG PENDIDIKAN BERDASARKAN PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (STUDI PELAKSANAAN PEMENUHAN SARANA PENDIDIKAN OLEH UNIVERSITAS BRAWIJAYA. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(1).
- Pratomo, D. T. (2015). PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS (PEOPLE WITH DISABILITY) DI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- RO'FAH, A. N. D. A. Y. A. N. I., & SUPARTINI, D. (2012). KEBIJAKAN BERBASIS HAK: PENGALAMAN PEMERINTAH DIY DALAM PENYUSUNAN PERDA PENYANDANG DISABILITAS. *WELFARE JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL VOLUME 1, NOMOR 2, DESEMBER 2012*.
- Rahayu, S., Dewi, U., Utami, A. S., & Rahajeng, U. PELAYANAN PUBLIK BAGI KAUM DIFABEL DI KOTA YOGYAKARTA.
- Sugiono, S., Ihamuddin, I., & Rahmawan, A. (2014). Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance. *INDONESIAN JOURNAL OF DISABILITY STUDIES (IJDS)*,1(1).
- Sugi Rahayu dan Utami Dewi. (2013). Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Kota Yogyakarta, *Natapraja* no 1 vol, pp 1-18
- Rahajeng, U. (2013). Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Kaum Difabel (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial).
- Pratomo, D. T. (2015). PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS (PEOPLE WITH DISABILITY) DI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Sukamto, D., & Hetyorini, H. (2013). ANALISIS PENINGKATAN FUNGSI BANGUNAN UMUM MELALUI UPAYA DESAIN ACCESSIBILITY. In *Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Fakultas*.
- Undang-undang no 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat